

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Disperindag Siapkan Anggaran Rp 9 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.2
Edisi	: Senin, 8 Oktober 2018

Disperindag Siapkan Anggaran Rp 9 Miliar

MARTADINATA, (GM).-

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat berencana menaikkan anggaran untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari Rp 7 miliar menjadi Rp 9 miliar di tahun 2019. Pengucuran dana ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional dalam menyelesaikan kasus konsumen.

Kepala Disperindag Jabar, M. Arifin Soedjayana mengatakan, Jabar telah memiliki BPSK di 16 kabupate/kota. Namun, pihaknya akan mendorong seluruh kabupaten/kota mempunyai BPSK di antaranya Garut, Kabupaten Bandung Barat, dan Majalengka.

"Laporan yang diterima pengaduan dari para konsumen di Jabar setiap tahunnya memang cukup banyak. Kalau jumlah pengaduan dari sisi wilayah terbanyak itu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan kasus penipuan serta barang kadaluarsa," tuturnya di Grand Tebu Bandung, Minggu (7/10).

Arifin pun menyoroti tantangan ekonomi pada era digital yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain menyangkut soal konsumen, imbuhnya, juga perlu ada peningkatan kualitas produk dan sistem pemasaran.

"Kami selalu mendorong agar konsumen teliti sebelum membeli dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Karena saat ini masyarakat harus menjadi konsumen cerdas di era ekonomi digital," katanya.

Menurutnya, kondisi yang berkembang saat ini ialah transaksi digital semakin meningkat sehingga berimplikasi pada tuntutan konsumen harus mempertahankan perannya sebagai "raja" dalam membeli dan konsumen dituntut harus semakin cerdas.

"Tentu perlindungan konsumen selalu menjadi perhatian kami di era ekonomi digital seperti ini. Apalagi, tren pertumbuhan digital 'kan mengalami perubahan drastis," jelasnya.

Waspada transaksi daring

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk waspada dalam bertransaksi secara online sebagai bagian dari gaya hidup yang tercermin melalui perilaku berbelanja.

Sebab, lanjut Arifin, dengan adanya kemudahan transaksi daring ini akan menguntungkan konsumen dalam memudahkan aktivitas transaksi pembelian produk-produk yang dilakukannya.

"Tapi, di sisi lain terjadi perluasan ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan produsen yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Tentu pemerintah perlu melindungi hak konsumen agar konsumen tetap merasa aman dan diuntungkan dalam bertransaksi secara elektronik," terangnya. **(wina)****